



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I Pendahuluan	I-1
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Landasan Hukum.....	I-1
I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) dan Kewenangan PD	I-1
I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran	I-2
I.3 Maksud dan Tujuan	I-3
I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD)	I-3
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD).....	I-4
I.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	II-1
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	II-1
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-19
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	II-20
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-22
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-29
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-1
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	III-10
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V Penutup	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	II-7
Tabel T-C.30	II-19
Tabel T-C.31	II-23
Tabel T-C.32	II-29
Tabel III.1	III-11
Tabel T-C.33	IV-4



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah (PD) adalah sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Proses penyusunan rencana kerja (renja) yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.2 Landasan Hukum

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3)
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4)



3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 82)
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 46)

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi dalam membuat perencanaan antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Saran tindak Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan yang memayungi dalam membuat anggaran antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya adalah:

1. Menjabarkan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya jangka pendek (satu tahun) untuk tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.



3. Serta sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi kebijakan dan sasaran strategis selama tahun 2024.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam jangka 1 tahun
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

I.4 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2024 dan pokok bahasan dalam penulisan rancangan akhir renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja (Renja) Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

I.2 Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah

I.4 Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD)

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD), permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) serta formulasi isu-isu penting



BAB III Tujuan dan Sasaran

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD)

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana.

BAB V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Proses penyusunan renja tahun 2024 membutuhkan evaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, untuk memperoleh kegiatan yang akan disusun pada tahun 2024 membutuhkan analisa dari berbagai sisi, serta memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan kegiatan tahun 2024 membutuhkan analisa dari renstra, serta analisa hasil capaian kegiatan sampai dengan triwulan empat tahun 2022.

Proses pembuatan renja 2024 diawali dengan melakukan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan. Berikut ini kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga sasaran yaitu meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, meningkatnya pemanfaatan publik terhadap saluran komunikasi informasi dan terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi memiliki 5 program, 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan dengan output persentase pelayanan gaji dan tunjangan ASN dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah direalisasikan sebesar 100%. Faktor pendorong tercapainya kegiatan ini karena adanya komitmen dari pimpinan yang menugaskan sekretariat bidang kominfo untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai serta tersedianya Anggaran gaji dan tunjangan pegawai dalam APBD tahun 2022.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan dengan output jumlah jenis ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 jenis. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah direalisasikan sebesar 4 jenis (100%).

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan dengan output jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 2 jenis. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah direalisasikan sebesar 2 jenis (100%).



2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Pada tahun 2022, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dilaksanakan dengan memiliki 2 output yaitu jumlah konten informasi yang diupload di media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika per tahun sebanyak 360 konten dan jumlah pelaksanaan publikasi melalui media sebanyak 2834 kali. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah direalisasikan sebesar 360 konten (100,00%) dan 3096 kali (105,23%).

2) Pelayanan Informasi Publik

Sub kegiatan pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan output jumlah kegiatan koordinasi dalam pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik sebanyak 50 kali. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah direalisasikan sebesar 52 kali (104,00%).

3) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan output jumlah pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan sebanyak 100 kali. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah direalisasikan sebesar 100 kali (100,00%).



3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pada tahun 2022, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memiliki 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dilaksanakan dengan output jumlah lokasi sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dipelihara dan pengembangan sarana dan prasarana TIK sebanyak 220 lokasi. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah terlaksana 249 lokasi (113,18%).

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan output jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan TIK sebanyak 58 perangkat daerah. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah terealisasi 58 perangkat daerah (100,00%).

2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah dilaksanakan dengan output jumlah pengecekan pusat data yang dikelola sebanyak 364 kali. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah terlaksana 378 kali (103,85%).

3) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan output jumlah pengelolaan / pengembangan aplikasi / proses bisnis sebanyak 190 aplikasi. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022,



kegiatan ini telah melakukan pengelolaan/pengembangan aplikasi sebanyak 190 aplikasi (100,00%).

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada tahun 2022, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki satu kegiatan dan satu sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dilaksanakan dengan output jumlah kegiatan pengumpulan data statistik sektoral sebanyak 12 kali. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah terlaksana 12 kali (100,00%).

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pada tahun 2022, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.21.02.2.01.04)

Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan output jumlah lokasi pengawasan keamanan informasi sebanyak 13 perangkat daerah. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini telah terlaksana 13 perangkat daerah (100,00%).



2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan output jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola sebanyak 1489 unit. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, kegiatan ini kegiatan ini telah terlaksana 1576 unit (105,84%)

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29



**Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,56%	N/A	89.54%	91.1492%	101.80 %	89,55%		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	100 %		



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

II-11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kegiatan koordinasi dalam pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik	N/A	N/A	50 Kali	52 Kali	104.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik						12 Dokumen		
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan									
		Jumlah pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	N/A	N/A	100 Kali	100 Kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						12 Dokumen		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
		Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

II-12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
		Jumlah pusat data yang mengelola satu server	N/A	N/A	2 Pusat data	2 Pusat data	100.00 %	N/A		
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan TIK	N/A	N/A	58 PD	58 PD	100.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						58 Dokumen		



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

II-14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah PD yang mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya TIK (service desk tier 1 dan tier 2)	N/A	N/A	58 PD	58 PD	100.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						58 Dokumen		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	100 %		



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

II-15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah									
		Jumlah lokasi sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dipelihara dan pengembangan sarana dan prasarana TIK	N/A	N/A	220 lokasi	249 lokasi	113.18 %	N/A		
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						267 Unit		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah sektor yang dianalisa	N/A	N/A	5 Sektor	5 Sektor	100.00 %	5 Sektor		



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

II-16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
		Jumlah kegiatan pengumpulan data statistik sektoral	N/A	N/A	12 Kali	12 Kali	100.00 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						12 Dokumen		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27%	N/A	8%	13.7931%	172.41 %	18%		



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

II-17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	N/A	N/A	6 Kali	6 Kali	100.00 %	6 Kali		
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola	N/A	N/A	1489 Unit	1576 Unit	105.84 %	N/A		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi						58 Perangkat Daerah		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi	N/A	N/A	3 kali/per hari	3.01 kali/per hari	100.33 %	3 kali/per hari		



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

II-18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan Informatika								
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah lokasi pengawasan keamanan informasi	N/A	N/A	13 PD	13 PD	100.00 %	N/A		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi						13 Perangkat Daerah		



II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ini menjabarkan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	-	-	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	
2	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,55	89,56	89,57	89,58	96,88	-	89,57	89,58	
4	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	42%	48%	54%	60%	-	-	54%	60%	
6	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	38%	50%	69%	88%	-	-	69%	88%	



II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi satu data

Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan, namun sayangnya data masih tersebar di masing-masing perangkat daerah. Data yang tersimpan di masing-masing perangkat daerah ini sering menyebabkan terjadi duplikasi data, bahkan data tertentu dimiliki atau dikelola oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah sehingga menyulitkan untuk mengetahui data mana yg lebih tepat dan akurat.

Seyogyanya semua perangkat daerah harus sepakat terkait dengan format dan metadata suatu data, karena dengan beragamnya format dan meta data di masing-masing perangkat daerah akan menyulitkan untuk mengintegrasikan menjadi satu data sehingga penting sekali keberadaan regulasi yang mengatur terkait dengan implementasi satu data.

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pusat data

Pusat data merupakan fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan layanan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk layanan. Pusat data juga memiliki infrastruktur, konektivitas, pengelolaan, manajemen dan alokasi sumber daya untuk keperluan ketersediaan layanan jangka panjang, kehandalan dan keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi.

Pusat data yang menjadi sentral layanan teknologi informasi dan komunikasi menjadi aset vital bagi terselenggaranya layanan, baik berjalannya sebuah layanan sistem informasi, dan akses dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pusat data menjadi strategis karena menunjukkan eksistensi aset yang sangat



berharga yaitu data dan informasi. Dalam perspektif nasional, sebuah negara, instansi pemerintah, organisasi bisnis pasti berusaha untuk menjaga kepentingan, dan aset pentingnya tersebut sehingga keberadaan pusat data menjadi penting.

3. Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan informasi

Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Penyelenggara pelayanan publik terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman keamanan informasi, yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja penyelenggara pelayanan publik. Peran sumber daya informasi dan teknologi informasi dan komunikasi semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola teknologi informasi dan komunikasi mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*). Adanya ancaman terhadap sumber daya informasi tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengamanan data dan informasi.



II.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada penyusunan rencana kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya TA 2024, telah mempertimbangkan visi misi kepala daerah serta kebijakan internal Pemerintah Kota Surabaya dan juga dilakukan proses membandingkan (review) antara Rancangan Awal RKPD TA 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dan kesesuaian dengan ketersediaan anggaran / pagu indikatif Tahun 2024. Berikut perbedaan dengan rancangan awal RKPD TA 2024 yang tersaji pada tabel T-C.31, perbedaan hanya pada besaran pagu indikatif per kegiatan sedangkan program dan kegiatan tidak mengalami perubahan.



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

II-23

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,56 %	15,934,810,569	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,56 %	15,548,022,889	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	13,437,430,200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	13,043,863,086	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	13,437,430,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	13,043,863,086	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	1,704,487,950	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	1,646,622,943	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,704,487,950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,646,622,943	



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

II-24

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	792,892,419	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	857,536,860	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	792,892,419	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	857,536,860	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87 %	15,418,988,106	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87 %	15,531,989,896	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	15,418,988,106	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	15,531,989,896	
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100 %				Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100 %		



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

II-25

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	853,925,479	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	1,169,295,592	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	2,706,436,696	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	1,881,914,990	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	11,858,625,931	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12,480,779,314	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27 %	6,731,959,430	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27 %	4,702,467,787	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	4,174,204,516	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	2,837,382,321	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	13 Perangkat Daerah	4,174,204,516	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	13 Perangkat Daerah	2,837,382,321	



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

II-26

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Layanan Keamanan Informasi					Layanan Keamanan Informasi			
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	2,557,754,914	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	1,865,085,466	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	2,557,754,914	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	1,865,085,466	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100 %	604,243,387	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100 %	511,833,819	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	604,243,387	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	511,833,819	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	604,243,387	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	511,833,819	
5	PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase pemenuhan	100 %	69,182,299,757	PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase pemenuhan	100 %	61,006,821,640	



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

II-27

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	APLIKASI INFORMATIKA		penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.			APLIKASI INFORMATIKA		penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100 %	54,447,541,983	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100 %	53,299,638,314	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	322 Unit	54,447,541,983	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	322 Unit	53,299,638,314	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100 %	14,734,757,774	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100 %	7,707,183,326	
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100 %				Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100 %		



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

II-28

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen	3,055,032,608	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen	2,479,710,038	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	486,194,185	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	416,892,245	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit	5,906,205,329	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit	1,440,375,979	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	5,287,325,652	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	3,370,205,064	
TOTAL					107,872,301,249	TOTAL					97,301,136,031



II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampung dan penjaringan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bottom-up planning berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi. Forum PD/Lintas PD juga merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Data untuk usulan program dan kegiatan yang disajikan dalam table T-C. 32 sebagai berikut:

Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,55	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Surabaya	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Surabaya	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	48%	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	
	Kota Surabaya	Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPIID \leq 17 hari kerja	100%	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kota Surabaya	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Kota Surabaya	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO \leq 1 x 24 jam b. Jaringan FO \leq 3 x	100%	



Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
Kabupaten/Kota		24 jam		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Surabaya	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi $\leq 1 \times 24$ jam	100%	
	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kota Surabaya	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	18%	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Kali/per hari	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Recana kerja tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional dengan antara lain mengacu pada rancangan awal RKPD 2022. Dengan memperhatikan hasil konsultasi publik RKP 2022, RPJMD Provinsi Jawa Timur, visi misi Kepala Daerah terpilih serta saran masukan forum konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Kota Surabaya tahun 2022 maka ditetapkan rancangan tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2023 “Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan”

Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah mengacu pada:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
2. Peraturan Walikota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam 1 sekretariat dan 3 bidang, yaitu:

1. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan



melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Serta Statistik** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang keamanan dan infrastruktur teknologi informasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. **Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov)** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov) yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tiap Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Rincian fungsi Sekretariat sebagai berikut:
 - a) pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
 - b) pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
 - c) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d) pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
 - e) pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
 - f) pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - g) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h) pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i) pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - j) pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
 - k) pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - m) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - n) pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;



- o) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di sekretariat;
 - p) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - q) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - r) dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Rincian fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik sebagai berikut:
- a) pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik;
 - b) pelaksanaan program dan petunjuk teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik;
 - c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d) pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - e) pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait data dan informasi;
 - f) pelaksanaan pelayanan penetapan standar format data dan informasi;
 - g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral;
 - h) pelaksanaan pengelolaan dan penyebarluasan data;
 - i) pelaksanaan penyajian data hasil pengolahan;
 - j) pelaksanaan pengendalian pemanfaatan data;
 - k) pelaksanaan perencanaan komunikasi publik;
 - l) pelaksanaan publikasi pemanfaatan layanan e-government dalam rangka mendukung smart city;
 - m) pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - n) pelaksanaan pembuatan konten lokal;
 - o) pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah atau media internal;
 - p) pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
 - q) pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;



- r) pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
 - s) pelaksanaan pemantauan terhadap tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintahan Daerah;
 - t) pelaksanaan pemantauan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
 - u) pelaksanaan pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - v) pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - w) pelaksanaan pelayanan dan mengolah pengaduan masyarakat;
 - x) pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - y) pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
 - z) pelaksanaan liputan;
 - aa) pelaksanaan pengelolaan media Pemerintah Daerah;
 - bb) pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan penyelenggaraan citra positif Pemerintah Daerah;
 - cc) pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - dd) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik;
 - ee) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - ff) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
3. Rincian fungsi Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai berikut:
- a) pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - b) pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;



- d) pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e) pelaksanaan perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- f) pelaksanaan perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g) pelaksanaan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- h) pelaksanaan rancangan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- i) pelaksanaan rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- j) pelaksanaan perancangan SDM Sandi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- k) pelaksanaan monitoring trafik elektronik;
- l) pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
- m) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di keamanan dan persandian;
- n) pelaksanaan pengujian keamanan domain dan sub domain;
- o) pelaksanaan pemantauan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- p) pelaksanaan audit TIK;
- q) pelaksanaan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif;
- r) pelaksanaan filtering konten negatif (jaringan Pemerintah Daerah);
- s) pelaksanaan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- t) pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;



- u) pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
- v) pelaksanaan penyelenggaraan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- w) pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- x) pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- y) pelaksanaan pengamanan kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- z) pelaksanaan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- aa) pelaksanaan pencadangan, pemulihan data, informasi dan sistem jika terjadi gangguan operasional keamanan dan persandian;
- bb) pelaksanaan pelayanan Penyusunan instrumen dan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- cc) pelaksanaan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- dd) pelaksanaan pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- ee) pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika;
- ff) pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur TIK;
- gg) pelaksanaan pelayanan government cloud computing;
- hh) pelaksanaan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- ii) pelaksanaan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;



- jj) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan dan teknologi informasi;
 - kk) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - ll) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
4. Rincian fungsi Tugas Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) sebagai berikut:
- a) pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov);
 - b) pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov);
 - c) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d) pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - e) pelaksanaan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government pemerintah daerah;
 - f) pelaksanaan pelayanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah;
 - g) pelaksanaan pelayanan implementasi e-government dalam rangka mendukung smart city;
 - h) pelaksanaan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government dalam rangka mendukung smart city;
 - i) pelaksanaan pelayanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian e-government dalam rangka mendukung smart city;
 - j) pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik;
 - k) pelaksanaan pelayanan interoperabilitas;
 - l) pelaksanaan pelayanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
 - m) pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;



- n) pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
- o) pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang TIK;
- p) pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dalam rangka mendukung smart city;
- q) pelaksanaan layanan sistem informasi e-government dalam rangka mendukung smart city;
- r) pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;
- s) pelaksanaan penetapan tata kelola nama domain dan sub domain;
- t) pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- u) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang layanan pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov);
- v) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- w) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menghadapi beberapa isu strategis. Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik kepada penduduknya. Agar pelayanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien, maka dukungan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut tidak hanya terbatas sampai pada *front office* saja, namun juga dibutuhkan integrasi pada sistem *back office*-nya sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu terintegrasinya berbagai sistem pelayanan baik untuk masyarakat Kota Surabaya maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, juga harus diikuti dengan pengoptimalan infrastruktur yang ada, agar tidak membebani anggaran mengingat kota juga masih memiliki program-program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pendidikan dan kesehatan sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu perlunya pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur yang memadai, tentunya tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkan. Dalam pengembangan sistem pelayanan publiknya Pemerintah Kota juga harus mempertimbangkan kemudahan pemanfaatannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang telah disediakan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melaksanakan tujuan dan sasaran renja tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel III.1
Tujuan, Sasaran, Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya Tahun 2024

Tujuan – Sasaran – Program	Indikator Tujuan Sasaran – Program	Target Kinerja Renja PD Tahun 2024
Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3 (Baik)
Sasaran : Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100%
Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,57
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,56
Sasaran : Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100%
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27%
Sasaran : Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	54%
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87%
Sasaran : Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	69%
Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. Program dan Kegiatan

A. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah: pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's), pengentasan kemiskinan, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan pencapaian smart city.



B. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 program yaitu:

1. Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri atas 1 kegiatan yang meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan, yaitu:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 3 kegiatan yang meliputi:
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 1 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 1 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 1 sub kegiatan, yaitu:
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri atas 2 kegiatan yang meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan, yaitu:
 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



4. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdiri atas 1 kegiatan yang meliputi:
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 3 sub kegiatan, yaitu:
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
5. Program pengelolaan aplikasi informatika terdiri atas 2 kegiatan yang meliputi:
 - 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 sub kegiatan, yaitu:
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 4 sub kegiatan, yaitu:
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Seluruh kegiatan dan sub kegiatan membutuhkan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp 114.344.155.284 yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat disajikan pada tabel T-C.33 :



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

IV-4

**Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan		89,56 %	Rp 15.548.022.889			89,57 %	Rp 17.978.012.542
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Rp 13.043.863.086			100 %	Rp 14.956.293.420
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang/bulan	Rp 13.043.863.086			37 Orang/bulan	Rp 14.956.293.420
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran		100 %	Rp 1.646.622.943			100 %	Rp 1.890.828.128
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 1.646.622.943			4 Paket	Rp 1.890.828.128
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		100 %	Rp 857.536.860			100 %	Rp 1.130.890.994
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		90 Unit	Rp 857.536.860			90 Unit	Rp 1.130.890.994



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

IV-5

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lainnya	yang Dipelihara							
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam		87 %	Rp 15.531.989.896			88 %	Rp 15.971.002.647
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan		4 Jenis	Rp 15.531.989.896			4 Jenis	Rp 15.971.002.647
		Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja		100 %				100 %	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		12 Dokumen	Rp 12.480.779.314			12 Dokumen	Rp 12.261.701.645
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12 Dokumen	Rp 1.169.295.592			12 Dokumen	Rp 816.076.555
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		12 Dokumen	Rp 1.881.914.990			12 Dokumen	Rp 2.893.224.447
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.		100 %	Rp 61.006.821.640			100 %	Rp 72.791.321.940
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam		100 %	Rp 53.299.638.314			100 %	Rp 30.735.177.424
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		322 Unit	Rp 53.299.638.314			381 Unit	Rp 30.735.177.424



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

IV-6

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %	Rp 7.707.183.326			100 %	Rp 42.056.144.516
		Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam		100 %				100 %	
2.16.03.2.02.0001		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		58 Dokumen	Rp 416.892.245			58 Dokumen	Rp 523.770.903
2.16.03.2.02.0003		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		2 Unit	Rp 3.370.205.064			2 Unit	Rp 5.465.223.740
2.16.03.2.02.0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		190 Unit	Rp 1.440.375.979			190 Unit	Rp 6.201.251.286
2.16.03.2.02.0010		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		58 Dokumen	Rp 2.479.710.038			58 Dokumen	Rp 29.865.898.587
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		100 %	Rp 511.833.819			100 %	Rp 663.636.328
2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		5 Sektor	Rp 511.833.819			5 Sektor	Rp 663.636.328
2.20.02.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi		12 Dokumen	Rp 511.833.819			12 Dokumen	Rp 663.636.328



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

IV-7

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi		27 %	Rp 4.702.467.787			34 %	Rp 6.940.181.827
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika		3 kali/per hari	Rp 2.837.382.321			3 kali/per hari	Rp 4.326.138.676
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		13 Perangkat Daerah	Rp 2.837.382.321			13 Perangkat Daerah	Rp 4.326.138.676
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan		6 Kali	Rp 1.865.085.466			6 Kali	Rp 2.614.043.151
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		58 Perangkat Daerah	Rp 1.865.085.466			58 Perangkat Daerah	Rp 2.614.043.151
TOTAL					Rp 97.301.136.031				Rp 114.344.155.284

*Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam prakiraan maju rencana th. 2025 mempertimbangkan prediksi inflasi dan prediksi kenaikan UMK.



KATA PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2024.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 10 Agustus 2023
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya



Ir. Ira Narulita Puspitarini, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196510101995032002